

2. PEMERINTAH PENDUDUKAN DAN KEBIJAKAN SEKUTU SERTA PELAKSANAANNYA DI JEPANG

2.1 Pembentukan Struktur Pemerintahan Pendudukan Sekutu di Jepang

Jepang sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia II harus menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dengan menerima Deklarasi Potsdam untuk menghindari kehancuran total dari Sekutu. Jepang pun harus menerima Deklarasi Potsdam dengan kedatangan pasukan Sekutu menduduki Jepang.

Rencana Sekutu untuk menduduki Jepang telah dimulai sejak diadakan konferensi di kota Potsdam (Jerman) pada tanggal 26 Juli 1945 yang diikuti oleh ketiga pemimpin dari Amerika Serikat (Presiden Harry S Truman), Inggris Raya (Perdana Menteri Winston Churchill), dan China (Presiden Chiang Kai-Shek). Hasil konferensi tersebut dinyatakan dalam Deklarasi Potsdam. Deklarasi Potsdam merupakan sebuah deklarasi yang berisi 13 pasal untuk menetapkan syarat-syarat penyerahan bagi Jepang. Beberapa hal yang penting dalam Deklarasi Potsdam adalah sebagai berikut:

1. Ketiga pemimpin dari Amerika Serikat, Inggris dan China memberikan kesempatan kepada Jepang untuk segera mengakhiri perang.
2. Penghapusan paham militer di Jepang.
3. Pendudukan Sekutu di Jepang akan diakhiri apabila tujuan deklarasi Potsdam telah tercapai.
4. Pembatasan wilayah kedaulatan Jepang yang terdiri dari pulau Honshū, Shikoku, Kyūshū, Hokkaidō serta beberapa pulau kecil di sekitarnya yang ditetapkan oleh Sekutu.
5. Penghukuman penjahat perang dan meningkatkan paham demokrasi. Pemerintah Jepang harus mendukung nilai-nilai demokrasi di kalangan masyarakat luas. Kebebasan beragama dan berpendapat sebagaimana penghormatan terhadap hak asasi manusia harus ditegakkan.

6. Pelucutan senjata militer.
7. Pelarangan persenjataan kembali.
8. Jepang diperbolehkan untuk mempertahankan industrinya yang penting untuk kelangsungan ekonominya dan untuk membiayai perbaikan ekonomi tetapi terhadap industri yang mendukung militer tidak diizinkan. Keikutsertaan Jepang dalam perdagangan dunia juga diperbolehkan.
9. Pilihan bagi Jepang selain menyerah tanpa syarat adalah kehancuran.

Jadi melalui deklarasi tersebut, pemerintah Jepang diberikan kesempatan untuk mengakhiri perang atau memilih penghancuran total oleh Sekutu⁵. Deklarasi Potsdam menyatakan bahwa pemerintah Jepang wajib tunduk pada pendudukan Sekutu untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dengan melaksanakan pembaharuan dan reformasi hingga tujuan Deklarasi Potsdam tersebut tercapai. Pilihan bagi Jepang jika tidak menerima deklarasi tersebut adalah Jepang akan menghadapi penghancuran total dari Sekutu.

Pada awalnya pemerintah Jepang tidak mengindahkan Deklarasi Postdam tersebut. Amerika Serikat segera mengambil tindakan dengan menjatuhkan bom atom yang pertama di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan bom atom yang kedua di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Sehari sebelumnya, pada 8 Agustus 1945 Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang. Untuk menghindari kehancuran yang lebih parah, pada tanggal 10 Agustus 1945 pemerintah Jepang membuat permohonan penyerahan yang pertama kepada Sekutu. Tetapi permohonan penyerahan Jepang yang pertama ditolak oleh Sekutu, karena dalam permohonan tersebut pemerintah Jepang meminta hak kaisar sebagai pemegang kedaulatan tidak diganggu-gugat⁶.

Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 melalui permohonan penyerahan yang kedua, Perdana Menteri Suzuki Kantaro sebagai wakil pemerintah Jepang bersedia menerima Deklarasi Postdam dan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Permohonan yang kedua tersebut secara resmi diterima dan disetujui oleh Sekutu

⁵*Occupation of Japan: Policy and Progress, Op. Cit.*, hlm 55.

⁶*Ibid.*, hlm 4.

melalui Presiden Truman⁷. Keesokan harinya pada 15 Agustus 1945 rekaman pidato kaisar Hirohito sebagai kepala pemerintahan Jepang tentang berakhirnya perang disiarkan melalui radio ke seluruh Jepang⁸.

Kemudian pada tanggal 30 Agustus 1945 Jenderal Douglas MacArthur bersama pasukan divisi Angkatan Udara AS mendarat di bandar udara Atsugi dekat Yokohama, dan sejak saat itu dimulailah masa pendudukan oleh Sekutu. Pada tanggal 2 September 1945 Jenderal MacArthur sebagai perwakilan Sekutu bersama perwakilan pemerintahan Jepang melaksanakan upacara penyerahan. Upacara tersebut dilakukan di kapal perang Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Dalam upacara tersebut, ditandatangani Dokumen Penyerahan (*Instrument of Surrender*) oleh Jenderal MacArthur sebagai Panglima Tertinggi Pasukan Sekutu (SCAP) beserta wakil dari Amerika Serikat, China, Inggris, Uni Soviet, Australia, Kanada, Prancis, Belanda dan Selandia Baru. Penandatanganan dokumen ini pihak Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Jepang yang bernama Mamoru Shigemitsu dan Jenderal Ume Yoshijito, sedangkan pihak Sekutu selain Jenderal MacArthur juga C. W. Nimitz dari Amerika Serikat, Hsu Yung Chang dari China, Bruce Fraser dari Inggris, K. Daryevyanko dari Uni Soviet, T. A. Blamey dari Australia, L. Moore Cosgrave dari Kanada, Leclerc dari Prancis, C. E. L. Helrich dari Belanda dan L. M. Issit dari Selandia Baru⁹. Dengan penandatanganan dokumen tersebut, maka secara resmi perang Jepang dengan Amerika dan sekutunya telah berakhir.

Setelah dilakukan upacara penyerahan yang ditandatangani pada tanggal 2 September 1945 tersebut, maka dibentuk beberapa organisasi yang bertugas melaksanakan pemerintahan pendudukan Sekutu di Jepang. Pada tanggal 6 September 1945 dibentuk Panglima Tertinggi Pasukan Sekutu (*Supreme Commander of the Allied Powers*). Pemimpin *Supreme Commander of the Allied Powers* (SCAP) dijabat oleh Jenderal Douglas MacArthur dari Amerika Serikat. SCAP merupakan organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi di Jepang.

⁷ *Ibid.*

⁸ Ishii, Ryosuke. *Sejarah Institusi Politik Jepang* (Jakarta: PT Gramedia, 1988), hlm 163.

⁹ *Occupation of Japan: Policy and Progress, Op. Cit.*, hlm 63.

Pembentukan SCAP sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Jepang disetujui oleh Presiden Amerika Serikat Harry Truman untuk mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan di Jepang. SCAP bertanggung jawab penuh untuk memberikan instruksi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan Sekutu yang dijalankan oleh pemerintah Jepang. Jenderal MacArthur yang telah menerima kedaulatan penuh sebagai pemimpin SCAP secara langsung dapat mengatur pemerintahan Jepang dengan memberikan instruksi dan mengarahkan kebijakan bagi pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang harus mematuhi instruksi dan petunjuk yang diberikan oleh SCAP. Peran pemerintah Jepang hanya menjadi pelaksana kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui SCAP. Kedaulatan yang dimiliki oleh SCAP adalah:

1. Kekuasaan kaisar dan pemerintah Jepang untuk memerintah negara berada di bawah kekuasaan SCAP.
2. Pengendalian dan pengaturan Jepang akan dilakukan melalui pemerintah Jepang sampai menghasilkan hasil yang memuaskan.
3. Maksud dan tujuan dari Deklarasi Potsdam akan dilaksanakan secara penuh. Pasal-pasal yang terdapat dalam Deklarasi Potsdam merupakan bagian dari kebijakan untuk menjaga hubungan Jepang dengan negara lain dan menjaga perdamaian serta keamanan di Timur Jauh¹⁰.

Berdasarkan kedaulatan yang dimiliki oleh SCAP tersebut, pemerintah Jepang diharuskan tunduk kepada SCAP. SCAP merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi di Jepang, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan petunjuk, instruksi dan rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah Jepang. Jadi sebenarnya jalannya pemerintah pendudukan Sekutu di Jepang masih dijalankan oleh pemerintah Jepang, tetapi harus mengikuti instruksi yang diberikan oleh SCAP.

¹⁰ *Ibid.*, hlm13.

Selanjutnya dalam membantu pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Jepang, maka SCAP mendirikan beberapa badan yang bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing yang terdiri dari:

1. *The Economic and Scientific Section* yang bertugas mengurus bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan.
2. *The Civil Information and Educational Section* yang bertugas dalam bidang informasi publik dan pendidikan.
3. *The Natural Resources Section* yang bertugas dalam bidang sumber daya alam yaitu pertanian, perikanan, kehutanan dan pertambangan.
4. *The Public Health and Welfare Section* yang bertugas dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan publik.
5. *The Government Section* yang bertugas mengawasi struktur pemerintahan sipil di Jepang.
6. *The Legal Section* yang bertugas dalam bidang hukum.
7. *The International Prosecution Section* yang bertugas menuntut para penjahat perang.
8. *The Civil Communications Section* yang bertugas dalam bidang komunikasi seperti radio, pos, dan telegram.
9. *The Statistical and Report Section* yang bertugas mengumpulkan dan memeriksa data statistik serta laporan.
10. *The Counter Intelligence Section* yang bertugas dalam bidang keamanan.
11. *The Civil Intelligence Section* yang bertugas mengawasi keamanan publik.
12. *The Diplomatic Section* yang bertugas dalam bidang diplomasi dan hubungan Jepang dengan negara lain¹¹.

Badan-badan tersebut terdiri dari beberapa staf khusus yang bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing dan membantu SCAP dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Jepang.

¹¹ *Ibid.*, hlm15.

Pada tanggal 2 Oktober 1945 Markas Besar Sekutu (*General Headquarters*) secara resmi didirikan oleh Sekutu di Tokyo. Setelah itu dibentuk dua badan multinasional yang berhubungan dengan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pendudukan yaitu Komisi Timur Jauh (*Far Eastern Commission/FEC*) dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinya dan Dewan Sekutu untuk Jepang (*Allied Council for Japan*).

Komisi yang bernama Komisi Timur Jauh dibentuk di Washington pada tanggal 27 Desember 1945. Komisi tersebut pada awalnya terdiri dari perwakilan 11 negara yang tergabung dalam Sekutu yaitu Amerika Serikat, Inggris Raya, Uni Soviet, China, Belanda, Australia, Perancis, Kanada, Selandia Baru, India dan Filipina. Perwakilan FEC bertambah menjadi 13 negara ketika Burma dan Pakistan bergabung pada tahun 1949. Fungsi dan tugas FEC adalah sebagai berikut:

- (1) Merumuskan kebijakan, prinsip dan standar penerimaan kebijakan dan kewajiban Jepang sejak menyerah dari Sekutu.
- (2) Meninjau ulang permintaan setiap anggota komisi, setiap perintah yang diberikan kepada SCAP atau setiap tindakan yang diambil oleh SCAP.
- (3) Mempertimbangkan masalah-masalah lain yang muncul dengan persetujuan di antara anggota komisi¹².

Tujuan utama pembentukan Komisi Timur Jauh adalah untuk memformulasikan kebijakan, prinsip dan standar penerimaan kebijakan dan kewajiban Jepang sejak menyerah dari Sekutu¹³. FEC bertanggung jawab atas penentuan keputusan kebijakan Sekutu di Jepang, dan SCAP ditugaskan untuk menjalankan keputusan tersebut. Garis besar kebijakan yang dibuat oleh FEC tidak langsung disampaikan kepada SCAP, tetapi harus melalui pemerintah Amerika Serikat. Jadi seluruh keputusan kebijakan FEC disampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat tidak secara langsung menentukan garis besar kebijakan pendudukan di Jepang. Tetapi berdasarkan perjanjian Moskow, pemerintah Amerika Serikat mempunyai kuasa

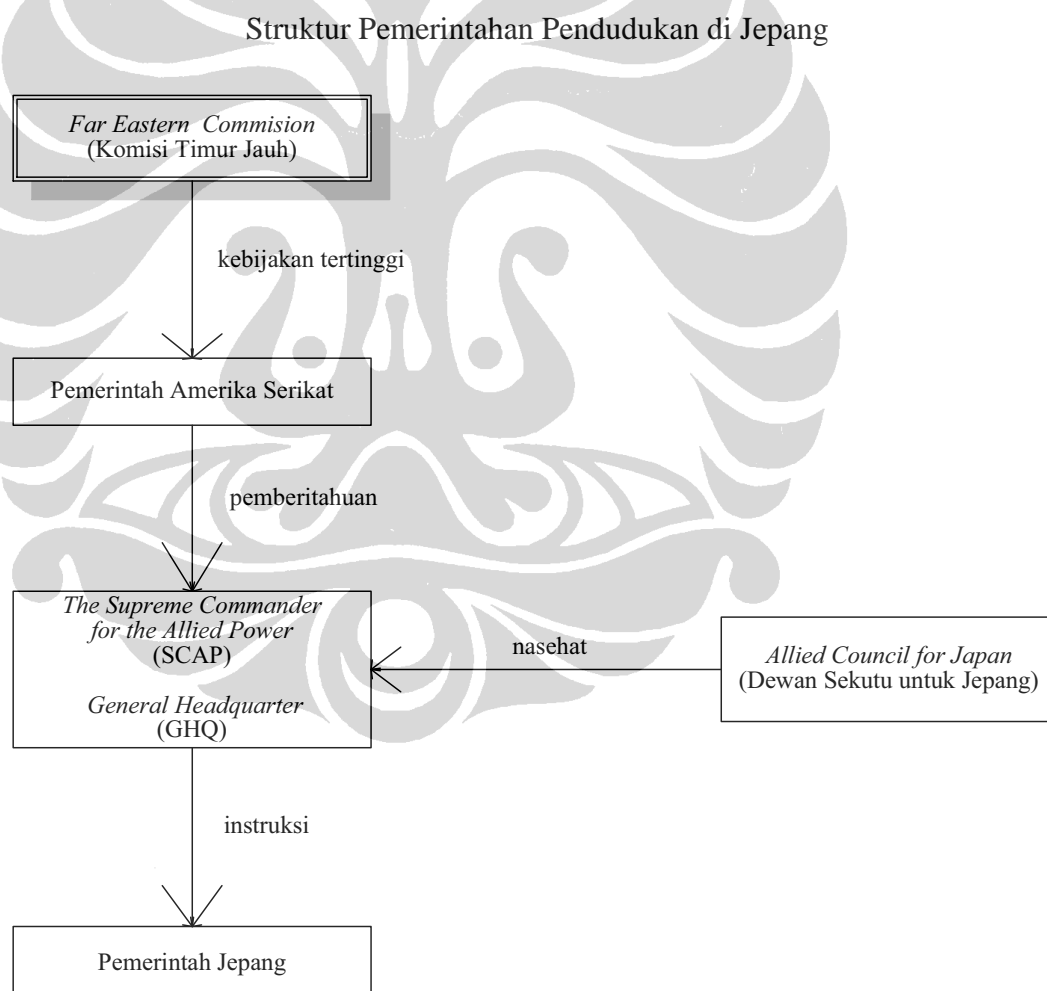
¹²*Ibid.*, hlm 67.

¹³*Ibid.*, hlm 8.

untuk mengeluarkan perintah sementara kepada SCAP, apabila terdapat masalah dalam kebijakan pendudukan yang belum diputuskan oleh FEC¹⁴.

Selain pembentukan Komisi Timur Jauh, Sekutu juga membentuk sebuah dewan penasihat yang bernama Dewan Sekutu untuk Jepang (*Allied Council for Japan*) dalam pelaksanaan kebijakan Sekutu di Jepang. Dewan ini merupakan badan penasihat yang terdiri dari wakil-wakil Amerika Serikat, Inggris Raya, Uni Soviet dan Cina. Tugas Dewan Sekutu adalah untuk memberi nasihat dan saran kepada SCAP.

Pada bagan berikut ini dapat dilihat struktur pemerintahan Sekutu di Jepang.



¹⁴ *Ibid.*, hlm 47.

Jadi struktur pemerintah pendudukan Sekutu di Jepang terdiri dari Komisi Timur Jauh (FEC), pemerintah Amerika Serikat, Panglima Tertinggi Pasukan Sekutu (SCAP), Dewan Sekutu untuk Jepang, dan pemerintah Jepang. Garis besar kebijakan Sekutu ditentukan oleh Komisi Timur Jauh, kemudian disampaikan kepada pemerintah Amerika Serikat. Selanjutnya pemerintah Amerika Serikat menyampaikan garis besar kebijakan tersebut kepada SCAP. SCAP sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Jepang memberikan instruksi kepada pemerintah Jepang untuk melaksanakan kebijakan pendudukan Sekutu. Dalam pelaksanaan pemerintahan pendudukan dan kebijakan Sekutu di Jepang, Dewan Sekutu bertugas menjadi badan penasehat bagi SCAP .

2.2 Kebijakan Pendudukan Sekutu

Berdasarkan isi Deklarasi Potsdam, maksud kedatangan pasukan Sekutu ke Jepang adalah untuk membentuk pemerintahan pendudukan bagi Jepang. Tujuan utama dari pelaksanaan pemerintahan pendudukan terhadap Jepang oleh Amerika Serikat dan sekutunya adalah untuk mengubah Jepang agar tidak dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Demi mencapai tujuan tersebut, pihak Sekutu melaksanakan program demiliterisasi dan demokratisasi melalui kebijakan pendudukan yang dilaksanakan di Jepang. Program tersebut perlu dilakukan oleh Sekutu, karena pada masa Perang Dunia II peran dan kekuatan militer Jepang menjadi salah satu penyebab agresi militer Jepang terhadap negara-negara lain. Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang pernah merasakan agresi militer Jepang, berkeinginan mempunyai peran utama dalam proses perubahan dan reformasi di Jepang melalui pelaksanaan kebijakan pendudukan Sekutu. Selain itu Amerika Serikat sebagai negara yang menjadi pemenang dalam perang melawan Jepang, berhak mengatur Jepang sesuai dengan kepentingan Amerika.

Walaupun pendudukan terhadap Jepang mengatasnamakan Sekutu, tetapi sebenarnya hanya Amerika Serikat yang berperan utama dalam menentukan kebijakan bagi Jepang. Kebijakan pendudukan Sekutu bagi Jepang yang diambil

oleh pemerintah Amerika Serikat merupakan bentuk pemerintahan secara tidak langsung. Kebijakan tersebut disampaikan pada pemerintah Jepang melalui SCAP, kemudian disampaikan kepada pemerintah Jepang. Hideo Okazaki memandang bahwa pihak yang paling bertanggung jawab atas perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pendudukan Sekutu terhadap Jepang adalah Amerika Serikat¹⁵. Pada kenyataannya, peran pemerintah Amerika Serikat terlihat sangat mendominasi dalam pendudukan Sekutu di Jepang. Hal tersebut dapat dilihat dari peran Amerika Serikat sebagai pemimpin Komisi Timur Jauh dan SCAP sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Sekutu di Jepang dijabat oleh Jenderal MacArthur dari Amerika Serikat. Jadi karena itu, peran Amerika Serikat sangat mendominasi dalam mereformasi dan mengatur Jepang sesuai dengan kebijakan dan kepentingan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat beranggapan bahwa Jepang sebagai negara militer dapat mengancam perdamaian dunia harus diubah menjadi negara yang demokratis dan menjunjung tinggi perdamaian dunia.

Pada awal masa pendudukan Sekutu di Jepang, kebijakan pendudukan Sekutu masih berfokus pada program demiliterisasi dan demokratisasi. Kebijakan pendudukan yang berfokus pada demiliterisasi dan demokratisasi merupakan kebijakan utama yang dijalankan oleh Sekutu untuk menjamin perdamaian dan keamanan. Untuk mendukung proses demiliterisasi dan demokratisasi tersebut, maka SCAP memberikan instruksi kepada pemerintah Jepang untuk melaksanakan kebijakan Reformasi Lima Besar (*five great reform/godai kaikaku*). Kebijakan tersebut terdiri dari

1. Persamaan hak bagi wanita.
2. Jaminan hak bagi buruh untuk berserikat.
3. Demokratisasi dan reformasi pendidikan.
4. Penghapusan sistem pemerintahan yang otoriter.
5. Demokratisasi ekonomi¹⁶.

¹⁵ Yudoyoko, Fajari Iriani Sophiaan. *Dinamika Hubungan Sipil Militer dalam Sistem Politik Jepang* (Depok: Pusat Studi Jepang UI, 2006), hlm 1.

¹⁶ Tadashi, Saitō. *Charenji Sōgōkamoku* (Tokyo: Kokusho, 2002), hlm 178.

Melalui instruksi kebijakan Reformasi Lima Besar tersebut, pemerintah Jepang diharuskan melakukan perubahan, dan pembaharuan berbagai bidang. Hal tersebut menyebabkan Jepang mengalami reformasi politik, ekonomi, dan sosial. Melalui perubahan bidang politik, ekonomi, dan sosial tersebut, Jepang diarahkan oleh Sekutu menjadi negara yang demokratis dan damai.

Walaupun garis besar kebijakan pendudukan Sekutu bagi Jepang ditentukan oleh Komisi Timur Jauh (FEC), tetapi dalam kenyataannya peran pemerintah Amerika Serikat lebih dominan daripada FEC. Pemerintah Amerika Serikat mempunyai hak untuk mengambil kebijakan sementara, dan kemudian disampaikan kepada SCAP apabila terdapat masalah dalam pendudukan di Jepang tanpa menunggu keputusan dari FEC. Jadi sebagian besar arah dan garis besar kebijakan pendudukan Sekutu di Jepang ditentukan oleh pemerintah Amerika Serikat.

2.3 Pelaksanaan Kebijakan Pendudukan Sekutu

Setelah upacara penyerahan, diserahkan sebuah dokumen yang disetujui oleh Presiden Truman kepada Jenderal MacArthur sebagai pimpinan SCAP. Dokumen tersebut bernama Kebijakan Awal Amerika Serikat bagi Jepang pasca Penyerahan (*United States Initial Post-Surrender Policy for Japan*) yang dibuat pada tanggal 29 Agustus 1945¹⁷. Dokumen tersebut merupakan kebijakan dasar yang berkaitan dengan penyerahan Jepang. Pelaksanaan kebijakan Sekutu di Jepang berdasarkan isi dokumen yang terdiri dari empat bagian yaitu:

1. Bagian I mengenai tujuan utama pendudukan

Tujuan utama pendudukan Sekutu terhadap Jepang adalah

- Untuk menjamin bahwa Jepang tidak akan pernah mengancam keamanan dan perdamaian dunia.

¹⁷ *Occupation of Japan: Policy and Progress, Op. Cit.*, hlm 73.

- Untuk mengadakan pembentukan pemerintahan di Jepang yang demokratis dan damai sesuai dengan kebebasan dan kehendak rakyat Jepang yang menghormati hak-hak negara lain, dan mendukung tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa¹⁸.

Tujuan utama tersebut dicapai dengan mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Kedaulatan wilayah Jepang terdiri dari pulau Honshū, Shikoku, Kyūshū, Hokkaidō serta beberapa pulau kecil di sekitarnya yang ditetapkan oleh Sekutu.
- Jepang dilucuti dan didemiliterisasi oleh Sekutu. Kekuatan dan pengaruh militer dihapuskan dari bidang politik, ekonomi dan sosial.
- Masyarakat Jepang didukung untuk mengembangkan kebebasan individu yang menghormati hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, berserikat, berbicara dan berkumpul. Hal tersebut juga didukung dengan demokrasi dan organisasi politik.
- Rakyat Jepang diberikan kesempatan untuk mengembangkan ekonomi yang tidak bertentangan dengan perdamaian¹⁹.

2. Bagian II mengenai kekuasaan Sekutu di Jepang

- Pendudukan oleh Sekutu

Pendudukan Sekutu dilakukan dengan cara mengirimkan pasukan militer untuk menjadi pemegang kekuasaan di Jepang. Kekuasaan tertinggi dalam pendudukan Sekutu di Jepang berada pada pimpinan SCAP. Walaupun kekuasaan tertinggi dalam pendudukan ada di tangan pihak militer bukan berarti pendudukan dilakukan secara militer. Pemerintahan di Jepang masih dilaksanakan oleh pihak sipil (pemerintah Jepang) berdasarkan instruksi dari SCAP.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 74.

¹⁹ *Ibid.*

- Hubungan Sekutu dengan pemerintah Jepang
Kekuasaan kaisar dan pemerintah Jepang berada di bawah kedudukan SCAP. Pemerintah Jepang masih diakui dan diizinkan untuk melaksanakan pemerintahan yang berdasarkan pada instruksi yang diberikan oleh SCAP.
- Publikasi kebijakan
Proses dan tujuan pelaksanaan kebijakan pendudukan Sekutu di Jepang akan disampaikan dan diinformasikan kepada masyarakat Jepang dan dunia internasional²⁰.

3. Bagian III mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah politik

- Demiliterisasi dan pelucutan senjata
Demiliterisasi dan pelucutan senjata merupakan tugas utama pendudukan militer yang harus diselesaikan. Militer Jepang yang terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan kepolisian harus dibubarkan. Paham dan doktrin militer serta paham ultranasionalis harus dihapuskan dari bidang pendidikan.
- Penjahat Perang
Para penjahat perang dan tokoh politik yang membawa Jepang dalam perang ditangkap, diadili, dan dihukum.
- Dukungan terhadap kebebasan individu dan proses demokrasi
Kebebasan beragama diumumkan pada awal masa pendudukan. Selain itu juga diumumkan pelarangan paham ultranasionalis dan militer. Kebebasan individu yang menghormati hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, berserikat, berbicara dan berkumpul dijamin oleh peraturan perundangan-undangan²¹.

²⁰ *Ibid.*, hlm 75.

²¹ *Ibid.*, hlm 77.

4. Bagian IV mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi

- Penghapusan bidang ekonomi yang mendukung kekuatan militer
Keberadaan sektor ekonomi yang mendukung kekuatan militer harus dihancurkan, dan tidak diizinkan untuk didirikan kembali. Program ini dilanjutkan dengan penghentian dan pelarangan terhadap produksi yang berhubungan dengan militer.
- Dukungan terhadap demokrasi
Dukungan akan diberikan terhadap perkembangan organisasi tenaga kerja, industri, dan pertanian yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi.
- Kegiatan perekonomian yang mendukung perdamaian
Pemerintah Jepang diinstruksikan untuk mengembangkan program yang bertujuan untuk:
 - 1) Mencegah kelesuan perekonomian.
 - 2) Menjamin sistem distribusi barang yang adil.
 - 3) Memulihkan perekonomian Jepang yang sesuai dengan tujuan utama pendudukan.
 Pemerintah Jepang di bawah instruksi SCAP bertanggung jawab menjalankan perekonomian yang sesuai dengan tujuan utama pendudukan.
- Penggantian kerugian perang
Penggantian kerugian perang ditentukan sesuai dengan keputusan dari Sekutu.
- Kebijakan fiskal, moneter, dan bank
Pemerintah Jepang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan fiskal, moneter dan bank yang diinstruksikan oleh SCAP.
- Hubungan perdagangan internasional
Jepang masih diizinkan untuk melakukan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Jepang diperbolehkan melakukan ekspor dan impor di bawah pengawasan Sekutu.

- Aset Jepang di luar negeri
Keberadaan aset-aset Jepang di luar negeri diserahkan pada keputusan Sekutu.
- Kesempatan usaha dan bisnis yang sama bagi perusahaan asing yang berada di Jepang
Pemerintah Jepang diharuskan memberikan kesempatan yang sama bagi perusahaan asing di Jepang untuk berbisnis.
- Anggaran dan hak milik kekaisaran
Anggaran dan hak milik kekaisaran diatur oleh Sekutu dalam menyelesaikan tujuan pendudukan²².

Kebijakan awal tersebut (*United States Initial Post-Surrender Policy for Japan*) disampaikan kepada Jenderal MacArthur sebagai pemimpin SCAP sebagai pedoman dalam menentukan garis besar dan arah kebijakan Sekutu untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Kebijakan awal tersebut juga merupakan kebijakan Amerika Serikat bagi Jepang yang membutuhkan kerja sama kedua belah pihak untuk mencapai tujuan utama dalam kebijakan tersebut. Berdasarkan isi kebijakan tersebut (*United States Initial Post-Surrender Policy for Japan*) ada tiga hal yang menjadi garis besar dan arah kebijakan pendudukan bagi Jepang yaitu:

1. Demiliterisasi untuk mencegah kembali agresi militer Jepang.
2. Demokratisasi untuk membangun pemerintahan yang damai dan bertanggung jawab.
3. Demokratisasi ekonomi yang mendukung perdamaian²³.

²² *Ibid.*, hlm 81.

²³ O. Reischauer, Edwin *The United States and Japan* (Cambridge: Harvard University Press, 1957), hlm 32.

Selanjutnya kebijakan tersebut disusul dengan Perintah Awal bagi SCAP dalam Pendudukan dan Pengendalian Jepang pasca Penyerahan (*Basic Initial Post Surrender Directive to the Supreme Commander for Allied Powers for Occupation and Control Japan*) yang dikeluarkan bulan November 1945. Jadi secara langsung seluruh kebijakan yang dijalankan di Jepang berada di bawah pengawasan pemerintahan Sekutu. Dengan perintah tersebut, pemerintah Jepang tidak mempunyai kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginannya sendiri.

Tujuan Deklarasi Potsdam dengan pelaksanaan kebijakan pada awal masa pendudukan Sekutu di Jepang berdasarkan kebijakan awal tersebut mempunyai tiga hal yang menjadi konsentrasi utama. Hal yang pertama adalah berkonsentrasi pada program demiliterisasi, hal yang kedua berkonsentrasi pada program demokratisasi dan hal yang ketiga berkonsentrasi pada demokratisasi perekonomian Jepang.

2.3.1 Demiliterisasi

Demiliterisasi merupakan suatu proses pengurangan pengaruh institusi dan nilai-nilai militer dalam suatu organisasi atau negara²⁴. Demiliterisasi biasanya merupakan suatu hasil dari perjanjian damai untuk mengakhiri perang atau konflik. Langkah awal SCAP yang menjadi penguasa pendudukan di Jepang berusaha memperlemah kekuatan militer Jepang dengan membubarkan angkatan perang Jepang yaitu angkatan darat dan angkatan laut. SCAP juga memperlemah kekuatan kepolisian dengan membuat undang-undang kepolisian yang baru. Dengan adanya undang-undang tersebut, kepolisian didesentralisaikan serta dikurangi jumlah personilnya dan ruang lingkupnya. Upaya pengurangan kekuatan militer Jepang tersebut dilanjutkan dengan penangkapan para tokoh yang dianggap sebagai penjahat perang, dan pemberhentian para pejabat pemerintahan yang membawa Jepang ke dalam perang.

²⁴ Yudoyoko, Fajari Iriani Sophiaan.*opcit.*, hlm 47.

Langkah selanjutnya di dalam bidang ekonomi adalah dilakukan pengurangan dan pelarangan bagi industri yang mendukung kekuatan militer Jepang. Industri senjata dan industri alat-alat keperluan militer ditutup pada saat masa pendudukan Sekutu. Setelah pelarangan produksi peralatan perang, dilanjutkan dengan pembatasan terhadap industri-industri berat seperti industri kimia, industri besi baja, dan industri perkapalan. Jadi semua kegiatan perekonomian yang berhubungan dengan militer dilarang dan diawasi oleh pihak Sekutu.

Dengan demikian arah dan kebijakan yang dikeluarkan pihak sekutu pada awalnya jelas secara umum adalah segera melaksanakan demiliterisasi yang diikuti dengan reformasi dalam bidang ekonomi yang diarahkan pada upaya pemusnahan potensi perang. Dalam hal ini, pelarangan dilakukan industri perlengkapan perang dan industri industri lain yang telah menyokong kekuatan militer Jepang. Sekutu juga mengawasi ekspor dan impor yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Selain itu, semua persenjataan militer Jepang dilucuti dan disita oleh Sekutu.

2.3.2 Demokratisasi

Sesuai dengan dokumen *United States Initial Post-Surrender Policy for Japan*, kebijakan pendudukan Sekutu berfokus pada program demiliterisasi yang bertujuan supaya bangsa Jepang tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia. Sedangkan program demokratisasi merupakan salah satu bagian kebijakan pendudukan Sekutu yang mendukung tujuan utama dari proses pendudukan di Jepang. Pemerintah Amerika Serikat menyadari bahwa pelaksanaan program demiliterisasi saja tidak cukup dalam menjamin tujuan pendudukan Sekutu di Jepang. Karena itu program demokratisasi diharapkan membantu dan memperkuat tujuan pendudukan Sekutu di Jepang. Dengan demikian demokratisasi merupakan suatu bagian penting dalam proses pendudukan Sekutu di Jepang.

Berbeda dengan proses demiliterisasi yang berjalan dengan cepat dan jelas, proses demokratisasi di Jepang berjalan dengan lambat dan banyak mengalami hambatan. Hal tersebut terjadi karena proses demokratisasi mencakup seluruh bidang. Tujuan SCAP mengubah struktur pemerintahan Jepang menjadi pemerintahan yang demokratis dan damai adalah supaya Jepang tidak pernah lagi mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Dalam mendukung dan memperlancar proses demokratisasi, maka pihak SCAP sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan instruksi kepada pemerintah Jepang untuk mereformasi berbagai bidang. Melalui instruksi Reformasi Lima Besar tersebut pemerintah Jepang menjalankan sejumlah kebijakan untuk mendukung proses demokrasi di Jepang.

Dalam bidang politik terjadi reformasi di dalam sistem politik, struktur pemerintahan dan hukum. Langkah awal SCAP mereformasi politik Jepang adalah mengubah hukum dan institusi politik yang mendukung proses demokrasi. Para penjahat perang ditangkap, diadili dan dihukum oleh mahkamah militer Sekutu. Paham militer dan ultranasionalis dihapus oleh penguasa pendudukan. Kaum militeris, kaum ultranasionalis, dan panglima perang diasingkan dari lembaga pemerintahan. Para tahanan politik selama masa perang dibebaskan oleh Sekutu. Untuk mendukung proses demokrasi di Jepang, undang-undang yang membatasi kebebasan pendapat, berkumpul dan berserikat dicabut. Selain itu, dengan adanya undang-undang pemilihan yang baru, hak suara bagi kaum perempuan untuk mengikuti pemilu diperbolehkan, dan hak bagi kaum perempuan untuk menduduki jabatan umum diakui. Reformasi dalam bidang politik yang dilakukan oleh SCAP juga menghasilkan Undang Undang Dasar Baru Negara Jepang (*Nihonkoku Kenpō*) pada tahun 1946. Undang-undang dasar baru tersebut mempunyai 3 prinsip dasar yaitu pengakuan pada hak-hak warga negara, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan paham demokrasi yang mendukung perdamaian.

Dalam bidang sosial dan pendidikan, pihak SCAP mereformasi organisasi sosial dan sistem pendidikan di Jepang. Pembentukan organisasi bagi para pekerja dalam sektor industri dan pertanian diperbolehkan dan didukung oleh SCAP. Tujuan SCAP mendukung serikat buruh dan asosiasi pertanian serta organisasi lainnya yang sebelumnya dilarang, untuk memperkenalkan sistem demokrasi kepada masyarakat Jepang.

Sedangkan reformasi dalam bidang pendidikan bertujuan untuk menghapus pengajaran paham-paham militer di dalam sistem pendidikan Jepang. Pada tahun 1947 ditetapkan Undang-Undang Pendidikan Dasar (*Kyōiku Kihonhō*) tentang sistem pendidikan. Melalui reformasi pendidikan tersebut ditetapkan program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun bagi semua anak laki-laki dan perempuan. Selain itu diterapkan sistem pendidikan model Amerika yang terdiri dari pendidikan dasar selama 6 tahun, pendidikan menengah pertama selama 3 tahun, pendidikan menengah atas selama 3 tahun dan pendidikan tinggi selama 4 tahun.

2.3.3 Demokratisasi dalam Bidang Ekonomi

Pada masa perang kekuatan militer Jepang mendapat dukungan dari kekuatan ekonomi seperti *zaibatsu*. Selain itu, banyak industri di Jepang yang mendukung kekuatan militer seperti industri kapal, industri pesawat tempur, dan industri senjata. Hal itu menyebabkan pemerintah pendudukan (SCAP) perlu melakukan pembaharuan dalam bidang perekonomian di Jepang. Pembaharuan tersebut dilaksanakan dengan menjalankan demokratisasi dalam bidang ekonomi.

Pada tanggal 6 September 1945 Jenderal MacArthur menerima dokumen yang berjudul *United States Initial Post-Surrender Policy for Japan* sebagai pedoman kebijakan dasar Sekutu bagi Jepang. Berdasarkan bagian keempat isi kebijakan tersebut mengenai ekonomi, SCAP melaksanakan demokratisasi bidang ekonomi di Jepang.

Ada beberapa hal yang penting dalam kebijakan tersebut. Pertama adalah penghentian dan pelarangan produksi untuk kepentingan militer, larangan produksi bagi armada dan pesawat tempur, pembatasan industri berat dan pembatasan perdagangan kapal. Hal yang kedua adalah memperkenalkan sistem demokrasi kepada masyarakat Jepang. Demokrasi tersebut diperkenalkan oleh SCAP dengan mendukung gerakan serikat buruh dan asosiasi pertanian serta organisasi lainnya yang sebelumnya dilarang. Hal yang terakhir adalah Jepang bertanggung jawab dalam menciptakan perekonomian yang mendukung perdamaian, dan bertanggung jawab sendiri dalam memulihkan perekonomiannya²⁵.

Pelaksanaan demokratisasi dalam bidang ekonomi di Jepang mempunyai tujuan utama untuk mencegah bangkitnya kekuatan militer Jepang dengan dukungan dari pihak ekonomi. Pada masa Perang Dunia II, kekuatan militer Jepang didukung oleh *zaibatsu*. Untuk mencegah kembalinya kekuatan militer Jepang, maka SCAP berusaha menghapus kekuatan ekonomi yang mendukung militer Jepang seperti pada masa perang. Bersamaan dengan tujuan tersebut, SCAP berusaha mengembangkan perekonomian di Jepang yang mendukung perdamaian dan keamanan dunia.

Selama masa pendudukan Sekutu di Jepang, SCAP menginstruksikan pemerintah Jepang untuk melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi. Arah dan garis besar kebijakan ekonomi Jepang lebih banyak ditentukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Arah kebijakan ekonomi tersebut juga berubah sesuai dengan kondisi dan situasi politik internasional. Perubahan arah kebijakan ekonomi tersebut berpengaruh pada proses pemulihan perekonomian Jepang.

²⁵ *Occupation of Japan: Policy and Progress, Op. Cit.*, hlm 81.